

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MELALUI
PROGRAM GERAKAN SEREMPAK MEMBANGUN KAMPUNG/
KELURAHAN (GSMK/K) DI KAMPUNG BUJUK AGUNG
KECAMATAN BANJAR MARGO KABUPATEN
TULANG BAWANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Dakwah**

Oleh :

**DIKI PRIMEIDANI
NPM. 1341020007**

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2019 M**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MELALUI
PROGRAM GERAKAN SEREMPAK MEMBANGUN KAMPUNG/
KELURAHAN (GSMK/K) DI KAMPUNG BUJUK AGUNG
KECAMATAN BANJAR MARGO KABUPATEN
TULANG BAWANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Dakwah**

Oleh :

**Diki Primeidani
NPM. 1341020007**

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam



Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. A. Achlami, HS, MA

Pembimbing II : Mardiyah, S. Pd. M. Pd

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2019 M**

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MELALUI PROGRAM GERAKAN SEREMPAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN (GSMK/K) DI KAMPUNG BUJUK AGUNG KECAMATAN BANJAR MARGO KABUPATEN TULANG BAWANG

Oleh :

Diki Primeidani

Pembangunan desa atau kampung memegang peranan penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa atau kampung. Pembangunan desa atau kampung sendiri tidak lepas dari adanya partisipasi masyarakat atau keikutsertaan masyarakat kampung dalam perencanaan pembangunan hingga evaluasi pembangunan oleh pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam program GSMK/K kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan beberapa penemuan data yang dirumuskan dalam bentuk kata-kata. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun sampel, peneliti mengambil dari aparat kampung, masyarakat kampung dan TIM POKMAS yang seluruhnya berjumlah 15 orang.

Hasil penelitian ini yaitu, (1) Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menunjukkan antusias masyarakat dalam menyumbangkan usulan mengenai permasalahan yang ada yang diutamakan melalui pembangunan; (2) Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yaitu masyarakat menyumbangkan tenaga berupa gotong royong dan juga menyumbangkan sebagian lahan untuk pelebaran jalan; (3) Partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi pembangunan yaitu masyarakat ikut memeriksa anggaran pengeluaran dan melihat hasil pembangunan; (4) Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan yaitu memelihara jalan seperti membuat portal, membersihkan siring dll; (5) Faktor pendukungnya ialah kesadaran masyarakat dalam ikut serta memajukan kampung, berupa antusias dalam memberkan pendapat dalam musyawarah dan semangat gotong royong.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembangunan, GSMK.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diki Primeidani

Npm : 1341020007

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Melalui Program Gerakan Serempak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang**, adalah murni hasil pribadi tidak mengandung *plagiarism* dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dan tata cara yang benar secara ilmiah.

Dengan pernyataan ini saya buat, apa bila kemudian hari terdapat *plagiarism*, maka saya bersedia menerima yang benar secara ilmiah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 04 November 2020
Penulis,

Diki Primeidani
1341020007

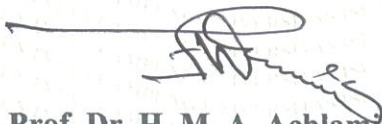
PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Melalui Program Gerakan Serempak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang

Nama : Diki Primeidani
NPM : 1341020007
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

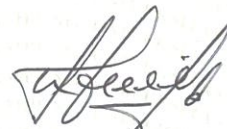
Telah diperiksa dan dikoreksi oleh pembimbing I dan pembimbing II, maka untuk itu pembimbing I dan pembimbing II menyetujui untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I



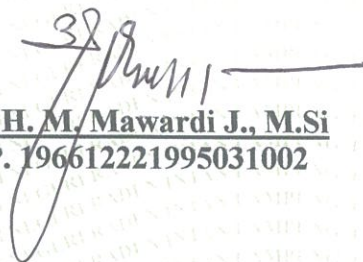
Prof. Dr. H. M. A. Achlami, HS, MA
NIP. 195501141987031001

Pembimbing II



Mardiyah, S. Pd, M. Pd
NIP. 197112152007012020

**Mengetahui,
Ketua Jurusan PMI**



Dr. H. M. Mawardi J., M.Si
NIP. 196612221995031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin. Telp. (0721) 704030 Sukarame 1 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MELALUI PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN DI KAMPUNG BUJUK AGUNG KECAMATAN BANJAR MARGO KABUPATEN TULANG BAWANG”, yang disusun oleh : Diki Primeidani, NPM:1341020007, Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada Hari/Tanggal : Rabu, 4 November 2020,

TIM PENGUJI

Ketua : H. Zamhariri, S. Ag., M. Sos.I (.....)

Sekretaris : Fiqih Satria, M.T. I (.....)

Penguji I : Dr. Jasmadi, M.Ag (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. M. A. Achlami, HS, MA (.....)

Penguji III : Hj. Mardiyah, S.Pd., M.Pd (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi




Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si
NIP. 196104091990031002

MOTTO

.... وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya : “.... Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (Q.S. Asy-Syura ; 38).



PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kupersembahkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdir-Mu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam, meraih cita-cita.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk, Ayahanda dan Ibunda.. terima kasih atas limpahan doa yang tak berkesudahan.

Terima kasih selanjutnya untuk adik-adikku tercinta, Adik Ima dan Rini yang luar biasa, dalam memberi dukungan dan doa yang tanpa henti.

Terima kasih juga yang tak terhingga untuk keluarga besarkku, Keluarga kakek suprpto dan nenek ning dan lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu. Om wistik sekeluarga kalian sebagai wali orang tua keduaku setelah Ayah dan ibunda, saran dan dukungan moral kalian sangat berarti, terimakasih banyak.

Almamater tercinta Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Diki Primeidani, dilahirkan di Mulya Asri, Kecamatan Way Abung Tulang Bawang Barat lahir pada tanggal 07 Mei 1994, anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Budiman dan Ibu Kiptianingrum.

Adapun pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah :

1. TK Xaverius DIPASENA Kecamatan Rawajitu Tulang Bawang, lulus pada tahun 2000
2. SDN 1 Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Tulang Bawang, lulus pada tahun 2006.
3. SMP Bina Bhakti Kecamatan Banjar Margo Tulang Bawang, lulus pada tahun 2009.
4. SMAN 1 Banjar Margo Kecamatan Banjar Margo Tulang bawang, lulus pada tahun 2012.
5. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke program S1 di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).

Adapun pelatihan yang pernah diikuti selama masa perkuliahan :

1. Kepelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tahun 2013
2. Pelatihan Fasilitator Usaha Kecil Menengah Tahun 2014

3. Pelatihan Mengurus Jenazah tahun 2014
4. Pelatihan Membangun Karakteristik Kepemimpinan tahun 2015
5. Pelatihan Mediasi Konflik tahun 2015
6. Pelatihan Pemberdayaan UKM tahun 2016

Bandar Lampung, 04 November 2020
Yang Membuat,

Diki Primeidani
1341020007



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur pada kehadirat Allah SWT yang telah melimpah taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Melalui Program Gerakan Serempak Membangun Kampung/Kelurahan di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang”. Shalawat serta serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita selaku umatnya tetap berada dijalanya dan mendapatkan syafaatnya dihari kiamat kelak.

Skripsi ini merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Khomsahrial Romli, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. M. Mawardi J, M.Si, Selaku Ketua Jurusan dan Bapak H. Zamhariri, S.Ag., M.Sos I, Selaku Wakil Ketua Jurusan.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. A. Achlami, HS. MA. Selaku pembimbing I dan Ibu Mardiyah, S. Pd. M. Pd, Selaku pembimbing II atas petunjuk dan saran beliau selama penulis menulis skripsi ini.

4. Ucapan terimakasih kepada Tim Penguji Munaqasah, H. Zamhariri, S.Ag, M.Sos.I selaku ketua sidang, sekretaris sidang Fiqih Satria, M.Ti dan Dr. Jasmadi, M.Si selaku Penguji Satu, Prof. Dr. M.A. Achlami HS, MA selaku Penguji Dua serta Hj. Mardiyah, M.Pd selaku Penguji Tiga
5. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada para dosen yang telah membantu dalam melakukan pencerahan, mentransfer serta mentransformasi ilmu pengetahuannya.
6. Pegawai perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan data, referensi, dan lain-lain.
7. Keluarga besar Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung atas diperkenankannya penulis meminjam buku literatur yang dibutuhkan.
8. Bapak Nurokhim selaku Kepala Kampung Bujuk Agung beserta jajaran Aparatur Kampung yang telah memberikan informasi, data, dan lain-lain.
9. Teman-teman PMI 2013 yang selalu memberi nasehat dan motivasi.

Semoga bantuan dan jerih payah semua pihak menjadi satu catatan amal baik disisi Allah SWT, Aamiin ya robbal' alamin.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak pembaca dan terkhusus bermanfaat bagi penulis

Bandar Lampung, 4 November 2020
Penulis,

Diki Primeidani
1341020007

DAFTAR ISI

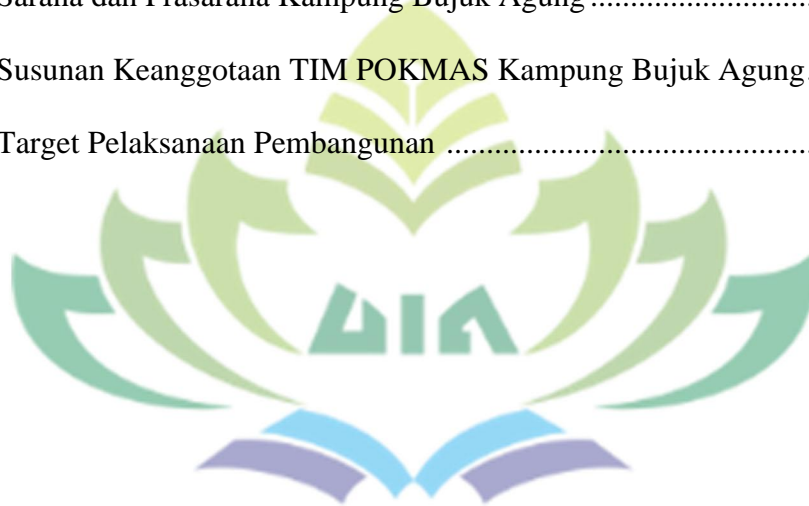
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	6
C. Latar Belakang Masalah	7
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Kajian Pustaka	21
BAB II PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MELALUI PROGRAM GSMK/K	
A. Partisipasi Masyarakat	23
1. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat.....	29
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Masyarakat	35
B. Pembangunan	40
1. Pembangunan Dari Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah.....	44
2. Pembangunan Daerah.....	46
3. Pembangunan Infrastruktur.....	50
C. Gerakan Serempak Membangun Kampung/Kelurahan	55

BAB	III	GAMBARAN UMUM KAMPUNG BUJUK AGUNG DALAM PEMBANGUNAN MELALUI PROGRAM GSMK/K	
	A.	Gambaran Umum Kampung Bujuk Agung.....	62
		1. Sejarah Singkat Kampung Bujuk Agung	62
		2. Struktur Kepengurusan Kampung Bujuk Agung	65
		3. Letak Geografis Kampung Bujuk Agung.....	67
		4. Jumlah Penduduk Kampung Bujuk Agung	67
		5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	69
		6. Mata Pencaharian Masyarakat Kampung Bujuk Agung	71
		7. Pola Penggunaan Tanah	73
		8. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Kampung Bujuk Agung	73
	B.	Pembangunan Melalui Program GSMK di Kampung Bujuk Agung	75
		1. Sejarah GSMK di Kampung Bujuk Agung	75
		2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Program GSMK/K.....	80
		3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program GSMK/K.....	85
BAB	IV	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MELALUI GSMK/K DI KAMPUNG BUJUK AGUNG	
	A.	Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Program GSMK/K di Kampung Bujuk Agung. .	88
	B.	Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program GSMK/K.....	91
BAB	V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A.	Kesimpulan	92
	B.	Saran.....	93
		DAFTAR PUSTAKA	94
		LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Bujuk Agung.....	66
2. Persebaran Penduduk Kampung Bujuk Agung.....	68
3. tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Bujuk Agung.....	70
4. Mata Pencarian Masyarakat Kampung Bujuk Agung.....	72
5. Pola Penggunaan Tanah Kampung Bujuk Agung.....	73
6. Sarana dan Prasarana Kampung Bujuk Agung.....	74
7. Susunan Keanggotaan TIM POKMAS Kampung Bujuk Agung.....	77
8. Target Pelaksanaan Pembangunan.....	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Pedoman wawancara
2. Pedoman observasi
3. Pedoman dokumentasi
4. Gambar
5. SK Judul
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
7. Surat Keterangan Kepala Kampung Bujuk Agung



DAFTAR GAMBAR

1. Dokumentasi Bersama Sampel
2. Dokumentasi Pembukaan Program
3. Dokumentasi Musyawarah Warga Kampung Bujuk Agung
4. Dokumentasi Pembangunan Jalan dan Sarana Prasarana Sebelum di Bangun
5. Dokumentasi Setelah Jalan di Bangun dan Perawatan Sarana Prasarana
6. Denah Lokasi Kampung Bujuk Agung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami arti yang terdapat dalam judul skripsi “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung Melalui Program Gerakan Serempak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K), Studi Di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang “maka penulis terlebih dahulu menjelaskan arti yang terdapat pada judul tersebut agar mudah dalam mendeskripsikan atau memahami. Adapun penjelasan dari definisi judul tersebut ialah sebagai berikut:

Di dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, makna partisipasi yaitu perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan keikutsertaan ataupun peran serta. Partisipasi mengandung makna yang amat luas dan arti yang dalam.¹

Dalam proses pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan, partisipasi masyarakat dapat berfungsi dalam enam fase proses pembangunan, yaitu fase penerimaan informasi, fase perencanaan pembangunan, fase pelaksanaan pembangunan, fase

¹Susilo Riwayadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Sinar Terang, 996), h. 560

penerimaan kembali hasil pembangunan, fase penilaian pembangunan. Sebagai keluaran, partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.²

Menurut Hoofsteede dalam Khairuddin mengatakan bahwa partisipasi berarti ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses pembangunan. Dalam pengertian ini paling tidak dapat dijumpai adanya tiga hal pokok, yaitu partisipasi merupakan keterlibatan mental emosional, partisipasi menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok, dan partisipasi merupakan tanggung jawab terhadap kelompok.³

Bornby dalam Theresia, mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.⁴

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan secara umum bahwa partisipasi adalah akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi dalam upaya pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil

² *Ibid*, h. 561

³ Abdul Latif, "Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Posigadan". Vol. 4 No. 1

⁴ Theresia Aprilia DKK, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. (Alfabeta, Bandung: 2014), h. 196

pembangunan. Jadi, partisipasi masyarakat mencakup semua aspek interaksi antara masyarakat dan pemerintah.

Sedangkan pengertian partisipasi masyarakat menurut Ndraha, diacu oleh Lugiarti, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

1. Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam memperhatikan dan menyerap lalu memberi tanggapan terhadap informasi, menerima dengan syarat maupun menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
4. Partisipasi pelaksanaan operasional.
5. Partisipasi menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan.⁵

Kemudian, pengertian pembangunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan pembangunan. Dengan begitu dapat diartikan sebagai proses perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.⁶

⁵Lugiarti E, *Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan*. (khanate, Jakarta: 2004), h. 97

⁶Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Keempat*. (Gramedia, Jakarta:2008), h. 156

Pengertian pembangunan menurut Riyadi dalam Theresia adalah suatu usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat yang berkehendak dan melaksanakan dan pembangunan itu.⁷

Pembangunan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang yang berupa pembangunan jalan onderlah, jembatan, pembangunan saluran irigasi, membangun selokan air, gorong-gorong, sanitasi berupa tempat pengolahan sampah RT pemeliharaan sarana dan prasarana kampung dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang penulis maksud adalah rangkaian kegiatan keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan kampung di Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo melalui program kabupaten Tulang Bawang yaitu Gerakan Serempak Membangun Kampung (GSMK/K). Keikutsertaan masyarakat Kampung Bujuk Agung dalam pembangunan Kampung itu sendiri berupa musyawarah/rembukan dan gotong royong membangun jalan, jembatan, pembangunan saluran irigasi, dan lain-lain.

Adapun dalam pembangunan infrastruktur Kampung Bujuk Agung adalah merupakan sebuah program pemerintah Kabupaten tulang Bawang yang bernama Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/kelurahan (GSMK/K). Program GSMK/K adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh,

⁷*Ibid*, Theresia Aprilia DKK, h. 2

dari, dan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang agar berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur kampung/kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Maksud dari program ini adalah suatu upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk mendorong adanya program pembangunan oleh, dari, dan untuk masyarakat. Selain itu tujuan program lainnya yaitu memanfaatkan potensi dan pranata sosial khas yang ada di Tulang Bawang, dengan memberikan bantuan dan langsung sebagai stimulan kepada masyarakat kampung/kelurahan.

Lokasi sasaran kegiatan program GSMK/K adalah di wilayah Kampung/Kelurahan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, salah satunya adalah Kampung/Kelurahan yang ada di Kecamatan Banjar Margo yaitu Kampung Bujuk Agung.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan penelitian adalah suatu studi tentang turut andilnya ataupun keikutsertaan secara langsung masyarakat kampung Bujuk Agung dalam memperbaiki sarana prasarana kampung dan juga untuk memajukan kampung yang lebih baik melalui program GSMK/K yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan program pengentasan kemiskinan melalui pengembangan prasarana pedesaan/kampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul tersebut adalah sebagai berikut

1. Penulis tertarik dengan penelitian di Kampung Bujuk Agung Karena Gerakan Serempak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) adalah langkah utama dari keberhasilan program untuk pembangunan infrastruktur kampung desa menjadi lebih baik, kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program maka satu langkah keburukan bagi pembangunan desa.
2. Hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat kampung Bujuk Agung dan POKMAS sesuai dengan isi pembelajaran yang ditempuh oleh penulis pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, yaitu mengenai upaya partisipasi, perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan yang saat ini dilakukan melalui program GSMK/K adalah mengenai kebersamaan persaudaraan dan kegotong-royongan guna membangun kampung yang mandiri.
3. Penulis mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan penulisan.
4. Akses menuju objek penelitian mudah untuk dijangkau oleh peneliti.

C. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu arahan pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2005–2025 seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah yang merupakan perwujudan pembangunan yang merata keseluruh wilayah (RPJPN Tahun 2005-2025). Konsentrasi penduduk miskin terbesar di Indonesia terdapat di wilayah pedesaan dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Salah satu penyebab banyaknya penduduk miskin dipedesaan adalah sulitnya akses ke pedesaan.⁸

Kondisi yang demikian membuat peran serta sektor pertanian yang merupakan pencaharian sebagian besar penduduk desa tidak dapat menunjang untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan. Penyediaan prasarana merupakan bagian terpenting dalam upaya pengembangan dan pembangunan wilayah. Tersedianya prasarana yang memadai dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi. Kondisi sosial yang baik, masyarakat akan lebih memiliki kemampuan berpartisipasi dalam penyediaan prasarana di lingkungannya.

Pembangunan desa atau kampung memegang peranan penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui

⁸Jayadinata TJ, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Desa, Perkotaan dan Wilayah*. (ITB, Bandung :1999, h. 256

banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa atau kampung.

Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengkomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintah, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada ditengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara kedesa. Terkait dengan program pengentasan kemiskinan melalui pengembangan prasarana pedesaan di provinsi Lampung, peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Dalam pembangunan desa atau kampung, telah banyak program pembangunan yang digulirkan, salah satunya adalah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tulang Bawang sesuai Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program GSMK/K. Sejak tahun 2013 kabupaten Tulang Bawang telah menggulirkan program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K). program yang direncanakan akan dilaksanakan selama 5 tahun dari tahun 2013 sampai 2017, ini ditujukan untuk mengembangkan infrastruktur prasarana di wilayah Kabupaten Tulang Bawang dengan berbasis partisipasi dan keswadayaan masyarakat.

Program GSMK/K adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang agar berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur kampung/kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Maksud dari program ini adalah suatu upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk mendorong adanya program pembangunan oleh, dari, dan untuk masyarakat.

Selain itu tujuan program lainnya yaitu memanfaatkan potensi dan pranata sosial khas yang ada di Tulang Bawang, dengan memberikan bantuan dana langsung sebagai stimulan kepada masyarakat kampung/kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat. Besaran dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam program GSMK/K terhadap masing-masing kampung adalah sebesar 200 juta rupiah.

Namun, kita ketahui bahwa selama ini tingkat partisipasi masyarakat masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa berperan secara luas sejak perencanaan sampai evaluasi. Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek pembangunan. Hal ini telah diatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Oleh sebab itu, pemerintah juga bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat kampung/kelurahan dalam pembangunan daerah, dalam hal ini

pelaksanaan program GSMK/K ditingkat kampung/kelurahan dijalankan dan dikoordinasikan oleh kelompok masyarakat (pokmas). Terdapat delapan peran pokmas dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program GSMK, diantaranya adalah peran menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan dan membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam program ini yaitu keikutsertaan masyarakat dalam menyukseskan program ini dan swadaya masyarakat berupa tenaga bantuan, dana bantuan dan material bahan bangunan yang berguna bagi kelancaran program ini.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mempelajari tingkat partisipasi masyarakat dalam dalam pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi sehingga terealisasinya program tersebut. Maka dari itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK/K) di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang".

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penulisan ini adalah :

1. Apa saja bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung melalui program GSMK/K di kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang?

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam program GSMK/K Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung melalui program GSMK/K di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam program GSMK/K Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisdalam penelitian ini ada dua yaitu :

1. Tujuan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana proses efektivitas Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK/K) dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran dan referensi bagi program Kabupaten Tulang Bawang yaitu GSMK/K. Kemudian tujuan bagi aktivitas akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

serta pembaca diharapkan menjadi informasi dan referensi ataupun perbandingan untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik berkaitan tentang proses manajemen pengadaan tenaga kerja.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Karena, menurut Strauss dan Corbin, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.⁹ Secara terminologis, penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.¹⁰ Kemudian menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.¹¹

Berdasarkan pengertian di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengidentifikasi yang

⁹TH. Endang Purwoastuti, Elisabeth S.W., *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT.Pustaka Baru, 2014), h. 19

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4.

¹¹*Ibid*, h. 6.

berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam program GSMK/K di Kampung Bujuk Agung kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

Metode penelitian kualitatif dilakukan dengan mendengar pandangan partisipan terkait persepsi terhadap fenomena yang akan diteliti secara holistik (menyeluruh), yakni dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata untuk menggali data dan informasi yang dibutuhkan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini mengambil jenis penelitian lapangan (*field resaerch*) terutama dilakukan di lembaga untuk menemukan realitas apa yang terjadi mengenai masalah tertentu. Menurut Hadari Nawawi penelitian lapangan (*field research*) adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintahan.¹² Dengan kejelasan seluruh penelitian lapangan diantara salah satunya adalah (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu suatu cara yang dilakukan secara sistematis dan mendalam.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah aparatur kampung, Tim kelompok masyarakat (Pokmas) dan warga kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

¹²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998), h. 31

3. Populasi dan sample

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³ Sama halnya yang dikatakan Kholidi S, bahwa Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan di selidiki karakteristik atau ciri-cirinya.¹⁴

Sehingga yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kampung Bujuk Agung yang berjumlah 3.214 Jiwa.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini adalah sampel penelitian. Untuk itu diperlukan teknik sampling (cara yang digunakan untuk mengambil sampel).¹⁵ Sedangkan menurut Imam Suprayogo dan Tobroni teknik sampling adalah suatu cara yang berkaitan dengan pembatas jumlah dan jenis sumber data yang akan

¹³Sugiono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfa Beta, 2009) Cet. Ke-8. h 81

¹⁴Kholidi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Fak Dakwah dan Ilmu Komunikasi, IAIN Lampung, 2010), h. 74

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1973), jilid I, h. 75

digunakan dalam penelitian,¹⁶ untuk itu sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan peneliti.

Menurut Notoatmodjo purposive sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan atas suatu timbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi atau ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Sedangkan menurut Sugiono purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bias lebih representative.

Berdasarkan dengan data-data yang demikian tadi maka ciri-ciri yang menjadi sampel yaitu:

1. Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung yang memberikan wewenang kepada POKMAS sebagai tim penggerak pembangunan kampung.
2. Tim POKMAS selaku Fasilitator yang selalu aktif dalam melaksanakan musyawarah perencanaan kegiatan pembangunan kampung.
3. Masyarakat Kampung Bujuk Agung yang ikut serta berpartisipasi aktif dalam musyawarah yang diadakan dan selalu aktif mengikuti atau melaksanakan kegiatan pembangunan.

¹⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metologi Penelitian Social Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 165.

Dari keseluruhan populasi yang ada, maka penulis mengambil sampel 3 orang Tim POKMAS yaitu ketua, bendahara, tim monitor dan evaluasi; kepala Kampung, 5 Kepala Dusun dari tiap RW, dan juga 7 orang warga Bujuk Agung. Dengan demikian, jumlah keseluruhan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a) Metode Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjau secara cermat dan langsung. Menurut Husein Umar, Observasi yaitu teknik ini menuntut adanya pengamatan dari sipeneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya. Observasi dibagi menjadi dua, yaitu *participant dan non participant*.¹⁷ Observasi non-partisipan, yaitu observasi yang tidak turut ambil bagian melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan pengamatan dilapangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *observasi non participant* dimana penulis tidak turut ambil bagian dalam kehidupan orang yang observasi. Selanjutnya metode ini penulis gunakan untuk menghimpun data, Adapun data yang penulis butuhkan adalah latar belakang terlaksananya Program Gerakan

¹⁷ Kartini Kartono, *Op., Cit*, h. 270

Serentak Membangun Kampung (GSMK) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bujuk Agung dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung Melalui Program GSMK serta dampak adanya program GSMK terhadap masyarakat miskin di Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo yang penulis teliti. Adapun yang diobservasi dalam ini adalah warga dan kegiatannya.

b) Metode *Interview*

Interview atau wawancara merupakan percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu. Kegiatan ini merupakan proses tanya jawab secara lisan dari dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik (langsung). Oleh karena itu kualitas hasil wawancara ditentukan oleh pewawancara, responden, pertanyaan dan situasi wawancara.

Menurut Husein Umar, Wawancara ialah salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dengan berhadapan dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga dilakukan secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.¹⁸

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis *interview* (wawancara) bebas terpimpin yaitu pewawancara secara bebas bertanya apa saja dan harus menggunakan acuan pertanyaan lengkap dan terperinci agar data-data yang diperoleh sesuai dengan harapan. Pedoman

¹⁸ Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 51

interview hanya berfungsi sebagai pengendali agar jangan sampai proses wawancara kehilangan arah dalam *interview*. Metode ini adalah metode pokok yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Wawancara yang dilakukan berupa wawancara perorangan. Hal ini dimaksudkan agar data yang dibutuhkan lebih intensif. Penulis mendatangi atau membuat janji pertemuan di Balai Desa Kampung Bujuk Agung dan bertatap muka langsung dengan interview. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan menggunakan media berupa telephone dan Internet karena alasan kesibukan subyek yang diwawancarai dan untuk keefektif-efesienan waktu, khususnya untuk mempertanyakan materi tambahan yang belum sempat digali dan untuk konfirmasi.

Adapun data yang penulis butuhkan adalah latar belakang terbentuknya Program GSMK yang dilakukan oleh Kampung Bujuk Agung serta dampak adanya Program GSMK di Kampung Desa Bujuk Agung.

c) Metode Dokumentasi

Dalam melengkapi data-data yang diperoleh, penulis memerlukan data-data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, laporan, surat-surat resmi, dan foto-foto yang dapat menunjang.

Dokumen dalam penelitian ini berupa buku-buku, data-data warga Kampung Bujuk Agung seperti, identitas Bujuk Agung, jumlah warga, visi, misi, dan struktur aparatur Bujuk Agung.

5. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data, dalam menganalisa data menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status atau fenomena secara sistematis dan rasional.

Metode analisis kualitatif adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung serta menghasilkan suatu teori. Metode penelitian kualitatif bersifat subjektif dari sudut pandang partisipan secara deskriptif sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Dengan kata lain, metode ini lebih bersifat memberikan gambaran secara jelas suatu permasalahan sesuai dengan fakta di lapangan.

Dengan demikian, kegiatan analisis ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

a. Tahap Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan

penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

b. Tahap Penyajian Data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk matriks (display data) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral dalam penelitian ini dapat diketahui dengan mudah.

c. Tahap Verifikasi Data/ Penarikan Simpulan

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

H. Kajian Pustaka

Ada dua penelitian yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang sama yakni tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui program GSMK/K, antara lain yaitu sebagai berikut:

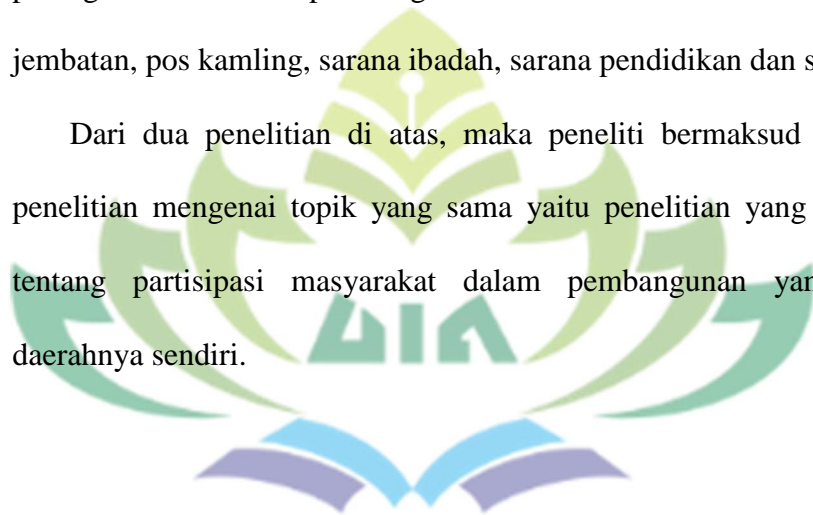
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hidayat Batubara pada tahun 2015 Universitas Lampung, dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai tingkat partisipasi masyarakat dan juga bagaimana peranan kelompok masyarakat dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang dalam program GSMK.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andi Ripai pada tahun 2013, yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam pembangunan desa di kecamatan Bontomatene tidak semua anggota masyarakat ikut berpartisipasi dengan berbagai macam alasan. Berbagai macam upaya dilakukan pemerintah untuk meyakinkan

masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, selain perhatian diharapkan juga pada aspek keadilan juga pemerataan pembangunan serta hasil-hasil, hendaknya pembangunan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat yang betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dirasakan oleh mereka. Demikian pula halnya dengan pembangunan di kecamatan Bontomatene nampaknya dari tahun-ketahun mengalami peningkatan terutama pembangunan sarana-sarana umum seperti jalan, jembatan, pos kamling, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sebagainya.

Dari dua penelitian di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai topik yang sama yaitu penelitian yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada di daerahnya sendiri.



BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MELALUI PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN (GSMK/K)

A. Partisipasi Masyarakat

Pengembangan masyarakat harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan membuat setiap orang dalam masyarakat terlibat secara aktif dalam proses-proses dan kegiatan masyarakat, serta untuk menciptakan kembali masa depan masyarakat dan individu. Dengan demikian, partisipasi merupakan suatu bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran. Semakin banyak orang yang menjadi peserta aktif dan semakin lengkap partisipasinya, semakin ideal kepemilikan dan proses masyarakat serta proses-proses inklusif yang akan diwujudkan.

Sumardi mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan materi. Serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.¹ Partisipasi menurut Sastropoetro Partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.² Partisipasi menurut Hoofsteede mengatakan bahwa partisipasi berarti ambil bagian dalam satu

¹ I Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan*. 2010, h. 46

² Sastropoetro Santoso R.A, *Partisipasi Komunikasi, persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 98

tahap atau lebih dari suatu proses pembangunan.³ Mikkelsen membagi partisipasi menjadi 6 pengertian diantaranya:

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- 2) Partisipasi adalah membuat peka pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- 3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- 4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkasit mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasanya untuk melakukan hal itu.
- 5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.⁴

Partisipasi menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani

³ Khairuddin, *Perencanaan Kot Indonesia, Konsep partisipasi Masyarakat*. (Jakarta: Gramedia, 2002), h. 124.

⁴ Mikkelsen Britha, *Metode Penelitian partisipasi dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 64

masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.⁵

Sedangkan pengertian masyarakat sendiri di dalam bahasa Inggris di identikkan dengan *Society* yang berarti kawan, pengertian ini ternyata sesuai dengan kenyataan bahwa masyarakat itu tidak daripada sekelompok manusia yang saling berhubungan dan bergaul. Berkaitan dengan pengertian tersebut ada beberapa definisi mengenai masyarakat menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Raiph Lington menjelaskan masyarakat adalah merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai kesatuan social dengan batas-batas yang telah ditentukan.⁶ Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terkait oleh suatu identitas bersama.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dipahami bahwa untuk dapat dikatakan sebagai masyarakat maka harus merupakan kelompok manusia yang telah bermukim dan bekerja sama dalam suatu wilayah (tempat) tertentu.

Masyarakat yang berarti pergaulan hidup perkumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan tertentu. Masyarakat

⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. (Depok: FISIP UI PRESS, 2007), h. 27

⁶ Ibid, h. 29

menurut Hasan Salidy dalam Abied memberikan pengertian bahwa masyarakat adalah kesatuan yang selalu berubah, yang hidup karena proses bermasyarakat yang disebabkan oleh proses perubahan tersebut. Sedangkan menurut Plato, masyarakat merupakan refleksi dari manusia perorangan yang terganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsur yaitu nafsu, semangat, intelegensi.

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dengan mengabaikan keterlibatannya dengan kepentingan pergaulan antara sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hubungan masyarakat manusia saling berinteraksi aktif. Manusia dapat mengintervensi dengan masyarakat lingkungannya dan sebaliknya masyarakat pun dapat memberi perlakuan timbal balik manusia sebagai warga.

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.⁷ Partisipasi bukanlah sekedar soal hasil. Ia adalah suatu proses dan dengan demikian meliputi banyak tingkat dan dimensi perubahan-perubahan dalam kapasitas organisasi komunitas dan individu, perubahan dalam sikap dan perilaku, perubahan dalam akses kepada sumberdaya, perubahan dalam keseimbangan kekuasaan, perubahan dalam persepsi para pemangku kepentingan. Partisipasi memiliki potensi untu

⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 2 ayat (4) huruf D.

berkontribusi pada perubahan penting dalam aspek-aspek politik, ekonomi dan sosial dari masyarakat dan dari kehidupan manusia.⁸

Dalam konteks pembangunan Adisasmita (2006) mengatakan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek.

Adisasmita juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi ketesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan.⁹ Prinsip partisipasi menuntu masyarakat harus memberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Partisipasi masyarakat merupakan kontrol adanya kekuasaan yang berlebih agar lebih efektif ditunjukkan sebesar-besarnya untuk masyarakat dalam konsep *good governance*. Adanya ruang

⁸ Jim Ife, Frank Tesoriero, *Op.cit.* h.295-296.

⁹Fathurrahman fadil, *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Vol. 1 Edisi 2 (Juli-Desember 2013), h. 251.

keterlibatan warga dan kerangka kelembagaan yang sesuai dalam partisipasi turut mendorong pembangun dan pemerataan.

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana dan program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Conyers menyebutkan terdapa tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan serta proyek-proyek lain akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program atau pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka merekaakan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tertentu.
3. Adanya suatu anggapan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak turut '*urun rembug*' (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan didaerah mereka.¹⁰

¹⁰ Conyers Diana, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Gagja Mada University Press, 1991), h. 154

Dengan demikian, partisipasi masyarakat sangat mempunyai keutamaan dalam pembangunan yaitu untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan juga dengan partisipasi, masyarakat secara aktif bergabung dalam proses pembangunan lingkungan fisik yang lebih baik, semangat publik yang lebih besar dan lebih berpuas hati dalam kegiatan pembangunan.

1. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Dalam sebuah pembangunan ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan, diantaranya:

- a. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana). Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka, dan partisipasi dalam hal yang bersifat teknis (desain proyek).
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan

- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.

Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.¹¹

Menurut Rusidi dalam Siregar Partisipasi masyarakat juga terefleksikan dalam berbagai bentuk:

- a. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan);
- b. Sumbangan materi (dan, barang dan alat);
- c. Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja);
- d. Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.

Sementara Cohen dan Uphoff dalam Ndraha (1990:104) menguraikan bentuk-bentuk partisipasi yang terbagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*)
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*)
- c. Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*)
- d. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

Menurut Thubany dalam Purnamasari partisipasi penuh dapat terwujud jika struktur kelembagaan memungkinkan warga untuk berpartisipasi dan memutuskan persoalan mereka sendiri sehari-hari dan representasi

¹¹ Dr. Tanziduhu ndraha, *Pembangunan Masyarakat 'Mempersiapkan Masyarakat Landas'*, (Rineka Cipta Cet.2, 1990), h.103-104.

masyarakat yang terwakili secara proporsional di dalam setiap proses pengambilan kebijakan atas nama kepentingan bersama. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat harus didasarkan pada; pembuatan keputusan, penerapan keputusan, menikmati hasil dan evaluasi hasil. Sementara empat aspek yang menjadi indikasi terbangunnya partisipasi, yakni:

- a. informasi atau akses lainnya
- b. inisiatif (voice/suara) dan apresiasi warga (masukan)
- c. mekanisme pengambilan keputusan
- d. kontrol pengawasan.¹²

Sedangkan menurut Yadav dalam Theresia ada empat bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dijelaskan, antara lain:

1. partisipasi dalam pembuatan keputusan yaitu, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditunjukkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan diwilayah setempat atau tingkat lokal.

¹² Fathurrahman fadil, *Op.cit*, h.255-256.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu, harus diartikan sebagai pemerataan sumbangna masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. Selain pasrtisipasi daalam pelaksaan kegiatan, partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati.
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan yaitu, kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan yaitu, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang

kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. Namun, pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya, yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat sasarnya.¹³

Sementara itu, Cohen dan Uphoff dalam Sari partisipasi dibedakan menjadi empat bentuk yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Yaitu terutama berkaitan dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujungnya iyalah bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Yaitu merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Didalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukanya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.

¹³Theresi Aprilia DKK, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 198

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Yaitu, tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Yaitu, berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.¹⁴

Berdasarkan beberapa uraian dari bentuk partisipasi tersebut, dilihat dari segi perkembangannya partisipasi tidak lagi diasumsikan sebagai pemberian kontribusi berupa uang atau sarana masyarakat secara sukarela, tetapi lebih ditekankan pada perkembangan kapasitas masyarakat yang ada didalamnya terdapat unsur pelibatan masyarakat dalam informasi, pengambilan keputusan serta kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi masyarakat itu sendiri.

¹⁴ Sari Yuli Kurnia, *Partisipasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam Melaksanakan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. (Jurnal Ilmiah: Administrasi Publik dan Pembangunan vol. 8 No. 1 2087-0825. 2016), h. 60

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

Faktor yang mendukung adanya partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan dapat dijelaskan oleh beberapa ahli diantaranya, menurut Selamet dalam Theresia menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok yaitu,

- a. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi
- b. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
- c. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.¹⁵

Sementara itu, Najib dalam Tanuwijaya menjelaskan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh:

- a) Siapa penggagas partisipasi, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM),
- b) Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan, apakah untuk kepentingan pemerintah atau kepentingan masyarakat.
- c) Siapa yang memegang kendali, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau lembaga donor. Jika pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memegang kendali cenderung lebih berhasil. Hal ini dikarenakan cenderung mengetahui permasalahan, kondisi dan kebutuhan daerah atau masyarakatnya dibandingkan pihak luar.

¹⁵ Theresia Aprilia DKK, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 207

- d) Hubungan pemerintah dengan masyarakat, apakah ada kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahanya. Jika hubungan ini baik, partisipasi akan lebih mudah dilaksanakan.
- e) Kultural, daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi dalam berpartisipasi (proses pengambilan keputusan melalui musyawarah) cenderung lebih mudah dan berlanjut.
- f) Politik, pemerintahan yang stabil serta menganut sistem yang transparan, menghargai keragaman dan demokratis.
- g) Legalitas, tersedianya (diupayakan) regulasi yang menjamin partisipasi warga dalam pengelolaan pembangunan (terintegrasi dalam sistem pemerintahan daerah).
- h) Ekonomi, adanya mekanisme yang menyediakan akses bagi warga miskin untuk terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh manfaat (baik langsung maupun tidak langsung) setelah berpartisipasi.
- i) Kepemimpinan, adanya kepemimpinan yang disegani dan memiliki komitmen untuk mendorong serta melaksanakan partisipasi, dapat dari kalangan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat itu sendiri atau tokoh masyarakat.
- j) Waktu, penerapan partisipasi tidak hanya sesaat, tetapi ditempatkan pada kurun waktu yang cukup lama.

- k) Tersedianya jaringan yang menghubungkan antara warga masyarakat dan pemerintah (forum warga).¹⁶

Sedangkan faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan yaitu diantaranya ialah:

Menurut Soetrisno dalam Theresia mengidentifikasi beberapa masalah kaitanya dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yakni;

- a. Masalah pertama dan terutama dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - 1) Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh (aparatus) pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai sup-koordinasi pemerintah.
 - 2) Pada pelaksanaan pembangunan dilapangan, pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedangkan yang dirancang dan ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah.
 - 3) Partisipasi masyarakat, sering didefinisikan kerjasama pemerintah dan masyarakat yang tidak pernah memperhatikan adanya sup-

¹⁶ Tanuwijaya Fransiska, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pitoe Jambangan kota Surabaya*. (Jurnal: Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 4 No. 2, 2016), h. 7

sistem yang disub-koordinasikan oleh supra-sistem, dan aspirasi masyarakat cukup diakomodasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

- b. Masalah kedua adalah, dengan dikembangkannya pembangunan sebagai ideologi baru yang harus diamankan dengan dijaga ketat, yang mendorong aparat pemerintah yang bersifat otoriter.
- c. Masalah ketiga adalah banyaknya peraturan yang merendahkan keinginan masyarakat yang ingin berpartisipasi.¹⁷

Sementara itu Dwiningrum menyebutkan faktor-faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat antara lain:

- a. Sifat malas, apatis, masa bodo, dan tidak mau melakukan perubahan ditingkat anggota dimasyarakat.
- b. Aspek-aspek tipologis.
- c. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya).
- d. Demografis (jumlah penduduk).
- e. Ekonomi (desa miskin atau tertinggal).¹⁸

Sementara itu, Solekhan mengatakan ada dua kategori yang dapat menghambat partisipasi masyarakat, yaitu:

- a) Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat

¹⁷ Theresia Aprilia DKK, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 211

¹⁸ Dwiningrum Siti Irene Astuti, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 57

Merupakan arena bagi masyarakat baik individu maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Makna ruang disini tidak terbatas pada makna spesial (tempat) saja tetapi juga berupa forum, pertemuan maupun media lainnya yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengakses secara terbuka dan adil. Jenis forum yang biasa digunakan masyarakat adalah musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes), namun dalam pelaksanaannya cenderung bersifat simbolik dan formalitas belaka. Akibatnya forum musrembangdes menjadi tidak kapabel untuk mewadai aspirasi kepentingan masyarakat.

b) Melemahnya modal sosial

Menurut Bardhan dalam Solekhan modal sosial merupakan serangkaian norma, jaringan dan organisasi, dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya dimana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Dalam konteks internet sosial, modal sosial, terwujud dalam bentuk jaringan atau asosiasi informal seperti arisan, jamaah tahlil, dan sebagainya. Asosiasi tersebut sifatnya eksklusif dan hanya melakukan kegiatan yang sifatnya keagamaan, ekonomi yang kurang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.¹⁹

¹⁹ Solekhan Moch, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Malang: Setara Press, 2012), h. 135

B. Pembangunan

Secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitasnya masyarakat atau produktivitas/pendapatan perkapita Negara tiap tahunnya.²⁰

Hakekat pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai, selanjutnya untuk memberikan ini S.P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut:

“Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.”
Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan itu sendiri terdapat inti pokok-pokok pengertian sebagai berikut:

- 1) Pembangunan adalah merupakan suatu proses, berarti suatu keinginan yang terus menerus dilaksanakan
- 2) Pembangunan merupakan usaha sadar yang dilakukan. Pembangunan mengarah kepada modernitas, yang di artikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih

²⁰ H. Rochajat Harun dan Dr. Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2011), h.3

menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan swasembada dan mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

- 3) Pembangunan dilaksanakan secara berorientasi pada pertumbuhan dan Perubahan.
- 4) Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional.
- 5) Bahwa kelima hal tersebut di atas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa (Nation Building) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya dijelaskan oleh Bintoro Tjokroamidjojo Bahwa: Pembangunan adalah suatu proses dinamis, kebijaksanaan harus memberi peluang kepada kenyataan tetapi harus mengandung kepastian dan kesinambungan bagi pelaksanaan yang fiktif menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dengan keridhoan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pengertian pembangunan seperti yang telah di uraikan pada kutipan tersebut memberikan kejelasan bahwa pembangunan itu adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Semua itu di maksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, baik dari segi kesejahteraan Rohani maupun Jasmani.

Pembangunan sebagai upaya memperbaiki keadaan, dalam arti yang lebih buruk menjadi baik dikemukakan oleh Kirdi dipoyudo bahwa:

“Pembangunan nasional adalah rangkaian usaha secara sadar berencana untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi program-program pembangunan yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.”²¹

Selain dilihat sebagai upaya memperbaiki keadaan, pembangunan juga dapat dilihat sebagai salah satu jalan untuk mengetahui segala potensi kreatif yang dimiliki oleh masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Jakob Oetama sebagai berikut:

“Pembangunan berusaha menggerakkan dan menguakkan potensi kreatif yang ada dalam masyarakat. Untuk merangsang potensi kreatif itu maka pembangunan mempertimbangkan sistem nilai struktur yaitu hubungan-hubungan dan peranan-peranan yang ada dalam masyarakat.”

Potensi yang dimiliki masyarakat seringkali terpendam dan untuk membangkitkan kembali harus melalui pembangunan. Potensi yang telah muncul melalui pembangunan tersebut sekaligus merupakan salah satu faktor yang dapat memperlancar jalannya roda pembangunan. Potensi-potensi yang dimaksudkan berupa budaya, ekonomi, nilai dan sebagainya.

Pada dekade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap pembangunan. Pendekatan baru ini disumbangkan oleh pengalaman administrasi pembangunan di Dunia Ketiga. Pandangan Coralie Bryant dan Louise White, menurutnya pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama definisi tersebut.

²¹ Bintoro Tjokrpamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*. (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1981), h. 3-4

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*)
2. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*)
3. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*)
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*)
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*)²².

Berhasil tidaknya pembangunan pada umumnya bergantung pada beberapa faktor seperti tenaga terlatih, biaya, informasi peralatan, partisipasi, dan kewenangan yang sah. Kendatipun ada berbagai faktor, di Negara-negara yang sedang berkembang faktor pemerintahlah yang terpenting, karena pemerintahlah yang berperan menggali, menggerakkan, dan mengkombinasikan faktor-faktor tersebut. Pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan nasionalnya yaitu dalam menetapkan kebijakan umum dan melaksanakannya. Proses penetapan kebijakan umum itu disebut pemerintahan, dan proses pelaksanaannya

²² Dr, Tanziduhu ndraha, *Op.cit*, h. 15-16.

yang juga disebut “*business side*” pemerintahan dinamakan administrasi Negara atau dapat juga disebut administrasi pemerintah (Negara).

1. Pembangunan Dari Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah

Dalam menghadapi proses pembangunan yang senantiasa mengalami perubahan terus menerus ini, etika agama diharapkan dapat memberikan sumbangan amat berharga dalam rangka memelihara dan menjaga keseimbangan dalam etos pembangunan. Pembangunan partisipatif harus dimulai dengan masyarakat sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui kebutuhannya. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah daerah harus dapat memposisikan diri sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan pembangunan desa.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa dibutuhkan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat guna bersama-sama melaksanakan program pembangunan desa. Selain itu juga diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat karena peran dan partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan, tanpa peran dan partisipasi dari masyarakat maka pembangunan desa tidak akan berjalan dengan maksimal.

Sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-nisa: 59 dijelaskan bagaimana kemajuan suatu masyarakat tergantung pada diri mereka sendiri yaitu dengan ketaatan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya serta

ketaatan kepada pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.

Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-nisa: 59)

Dari ayat diatas, menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan, taatilah Allah dan beramalalah dengan pedoman kepada kitab Allah; dan taatilah Rasul karena sesungguhnya Dialah yang menerangkan kepada manusia tentang apa yang telah diturunkan Allah kepada mereka. Dan pengertian taatilah *Ulil Amri* adalah para penguasa ahli-ahli hukum, para ulama, panglima-panglima, para pemimpin dan para zu'ama, mereka ini mampu mengembalikan manusia kepada ketentuan-ketentuan yang dibawa oleh Rasul dalam seluruh aspek kehidupan untuk kebaikan yang menyeluruh. Apabila Ulul Azmi telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib menaatinya dengan syarat mereka itu bias dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan Rosul-Nya, yang telah diketahui secara mutawwir. Sesungguhnya mereka itu (Ulil Amri) adalah

orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka.²³

Penjelasan diatas menunjukkan realitas bahwa pembangunan dan kesejahteraan umum tidak terlepas oleh kinerja pemerintah yang pelaksanaannya dibantu oleh kepala daerah dan desa, sehingga pembangunan ditingkat nasional banyak dipengaruhi oleh faktor kinerja pemerintah daerah dan desa. Oleh karena itu perkembangan dan pertumbuhan pembangunan terutama didesa sangat besar pengaruhnya oleh etos kerja aparatur pemerintah desa itu sendiri.

2. Pembangunan Daerah

Menurut Lincoln Arsyad dalam bukunya yang berjudul *Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, pengertian daerah berbeda-beda tergantung aspek ditinjaunya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu :

- a. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi di daerah dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya, budayanya geografisnya, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.

²³ Abdul Qodir Jailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. (PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1995). h. 92

- b. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut daerah modal.
- c. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administrasi suatu Negara. Disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.²⁴

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya–sumberdaya yang ada dan bersama sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya–sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya–sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif.

Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas

²⁴ Aditya Bagus Kurniawan, “Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur”. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol.3 No 5 (2015), h.20.

hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah:

- a. Meliputi seluruh aspek kehidupan
- b. Dilaksanakan secara terpadu
- c. Meningkatkan swadaya masyarakat²⁵

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek-proyek penunjang daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbangkan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Pembangunan desa bila ditinjau dari segi metodenya adalah merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai kegiatan pemerintahan, dan juga berbagai kegiatan partisipasi masyarakat. Namun titik berat pelaksanaannya atau sepanjang prosesnya, masyarakatlah yang paling berperan.

²⁵ *Ibid*, h. 22-23

Peran masyarakat tersebut adalah selain sebagai obyek pembangunan (berarti masyarakat terkena langsung berbagai kegiatan pembangunan), dan juga sebagai subyek pembangunan (berarti mereka harus mampu untuk berprakarsa membangun desanya dengan asas keswadayaan dan kemandirian mereka sendiri).

Tujuan pembangunan desa itu sendiri adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, sehingga memerlukan dukungan dan peran serta dari masyarakat, bukan saja sebagai obyek pembangunan, akan tetapi justru yang dituntut adalah ikut sertanya secara aktif masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Dalam pembangunan merupakan usaha masyarakat sebanyak mungkin ikut serta dalam pemerintah, memberi bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat dan menjamin keberhasilan pembangunan. Pemerintah juga harus sering menghimbau masyarakat karena keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi unsur masyarakat itu sendiri.

Dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan masyarakat membutuhkan peran serta seluruh komponen yang dianggap mampu menggerakkan dan menumbuh kembangkan pembangunan yang berbasis partisipasi dengan kesesuaian dalam makna dan tujuannya.

Oleh sebab itulah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang sedang berlangsung,

fungsi kepala desa dan POKMAS (Kelompok Masyarakat) sebagai organisasi yang mewadahi partisipasi masyarakat memegang peranan yang sangat penting dan menentukan.

Peran serta masyarakat dan menempatkan kedudukan sebagai subjek pembangunan yang amat penting, hal ini erat kaitannya dengan kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk memilih peranannya dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi diperlukan adanya motivasi yang melatarbelakanginya, yaitu adanya tuntutan, kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sendiri.

3. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur merupakan *Public Service Obligation*, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah.

Keberadaan infrastruktur sangat penting bagi pembangunan, sehingga pada fase awal pembangunan disuatu negara hal tersebut akan dipikul sepenuhnya oleh Pemerintah yang dibiayai dari APBN murni. Dalam pemenuhan infrastruktur atau fasilitas publik, diperlukan investasi yang cukup besar dan pengembalian investasi dalam jangka waktu yang

relatif lama. Selain itu, manajemen operasionalnya juga membutuhkan *cost* yang tinggi.

Permasalahan inilah yang menjadi kendala bagi kebanyakan negara-negara berkembang dalam pemenuhan infrastruktur. Namun kendala keterbatasan pembiayaan dari pemerintah tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan pola kerjasama yang bersifat *Public Private Partnership* yang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Pendekatan baru untuk dapat mengurangi masalah ini melibatkan peran-peran *stakeholder*.²⁶

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu strategi dalam penyediaan sarana yang utama untuk itu seperti diungkapkan dalam Infrastruktur Indonesia yaitu Prinsip Dasar Penyediaan Infrastruktur secara keseluruhan antara lain :

- a. Infrastruktur merupakan katalis bagi pembangunan. Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hampir dalam semua aktivitas masyarakat dan pemerintah, keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar.

²⁶ “Dampak Pembangunan Bandara Internasional Kuala Namu Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang”. (Tinjauan Pustaka Skripsi Program Sarjana Ilmu Pembangunan Universitas Sumatera Utara, Medan), h.22.

- b. Keterkaitan infrastruktur dengan berbagai aspek, agar peran infrastruktur dalam pembangunan menjadi optimal, maka keberadaan pembangunan infrastruktur harus terkait dengan:
- 1) Pembangunan pertanian, perkebunan, budidaya pantai, kelautan, industri, perdagangan, jasa, pariwisata, pertambangan, migas dan sebagainya
 - 2) Masyarakat yang akan menjadi kelompok sasaran pelayanan infrastruktur tersebut dan kemampuan dalam membayar jasa layanan infrastruktur;
 - 3) Institusi pengelolanya, misalnya peran pemerintah dalam pengelolaan atau pemeliharaan serta memberi arahan dalam bentuk regulasi sebagai bentuk layanan publik dan
 - 4) Dalam konteks privatisasi, investasi infrastruktur perlu mempertimbangkan minat investor tujuan yang dikehendaki investor, syarat-syarat investasi dan insentif bagi investor
- c. Perencanaan kebutuhan infrastruktur harus dilakukan melalui kombinasi antara perencanaan yang digagas pemerintah pusat dengan yang digagas pemerintah daerah. Seiring dengan diimplementasikannya desentralisasi fiskal dan diberikannya kewenangan yang lebih luas bagi daerah, setiap daerah diharapkan mampu lebih mengembangkan potensi daerahnya. Oleh karena itu pembangunan yang dilakukan di daerah harus didasarkan pada kebutuhan daerah masing-masing. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah diharapkan mampu

meningkatkan perekonomian daerah tersebut dan daerah sekitarnya. Untuk itu perlu kerangka pembangunan yang digagas pemerintah daerah, disamping kerangka model yang digagas pemerintah pusat yang selama ini digunakan. Yang dimaksud dengan adanya perencanaan yang digagas pemerintah daerah adalah terdapat rencana indikasi kebutuhan infrastruktur secara lokal dan regional, sehingga perencanaan tersebut ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan daerah. Sedangkan rencana pembangunan infrastruktur yang bersifat digagas pemerintah pusat dan dikoordinasikan oleh kantor Menko Perekonomian.

- d. Keberhasilan kerjasama Pemerintah dan Swasta memerlukan kondisi yang harus dipenuhi, yaitu :
- a) Stabilitas kerangka ekonomi makro;
 - b) Sektor keuangan yang efisien dan berkembang;
 - c) Kerangka kebijakan yang mantap;
 - d) Penerimaan proyek yang berkelanjutan;
 - e) Adanya mekanisme arbitrase atau penyelesaian penyelesaian yang jelas;
 - f) Undang-Undang perbankan yang berkembang dengan baik dan
 - g) Adanya investasi pendamping dari pinjaman pemerintah/ ekuitas/subsidi (Kewajiban Sektor publik).
- e. Penyediaan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan

aspek keberlanjutan, sehingga dalam jangka panjang keberadaan infrastruktur tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

- f. Mekanisme penyediaan infrastruktur harus didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, serta memperhatikan aspek efisiensi dan keadilan.²⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa Infrastruktur sebagai sistem yang dikaitkan dengan unsur yang berada di dalam suatu sistem ruang dan kegiatan, memiliki peran penting terhadap perubahan kemakmuran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Peran infrastruktur terhadap perkembangan wilayah dan kota memiliki kontribusi yang sangat signifikan, baik pada aspek perekonomian, sosial-kemasyarakatan, maupun kelestarian lingkungan. Akan tetapi arah kebijakan pembangunan sistem infrastruktur yang berlangsung saat ini belum menunjukkan hasil yang memadai untuk memerankan fungsinya sebagai pengarah dan pendorong pembangunan.

Berhasil tidaknya pembangunan pada umumnya bergantung pada beberapa faktor seperti tenaga terlatih, biaya informas peralatan, partisipasi, dan kewenangan yang sah. Kendatipun ada berbagai faktor, di Negara-negara yang sedang berkembang faktor pemerintahlah yang terpenting, karena pemerintahlah yang berperan menggali, menggerakkan, dan mengkombinasikan faktor tersebut.

²⁷ *Ibid*, h.23

Pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan nasionalnya yaitu dalam menetapkan kebijakan umum dan melaksanakannya. Proses penetapan kebijakan umum itu disebut pemerintahan, dan proses pelaksanaannya yang juga disebut “*business side*” pemerintahan dinamakan administrasi Negara atau dapat juga disebut administrasi pemerintah (Negara).

Masyarakat desa dalam perspektif pemerintahan diletakkan pada seluruh kegiatan yang proses demi proses diarahkan untuk mencapai tujuan. Namun di desa masih diliputi oleh beberapa keterbatasan, seperti keterbatasan pendidikan, personil administrasi, dana, serta sarana dan prasarana, sementara di lain pihak tuntutan pembangunan semakin meningkat yang menuntut kemampuan aparat pemerintah desa yang bersangkutan.

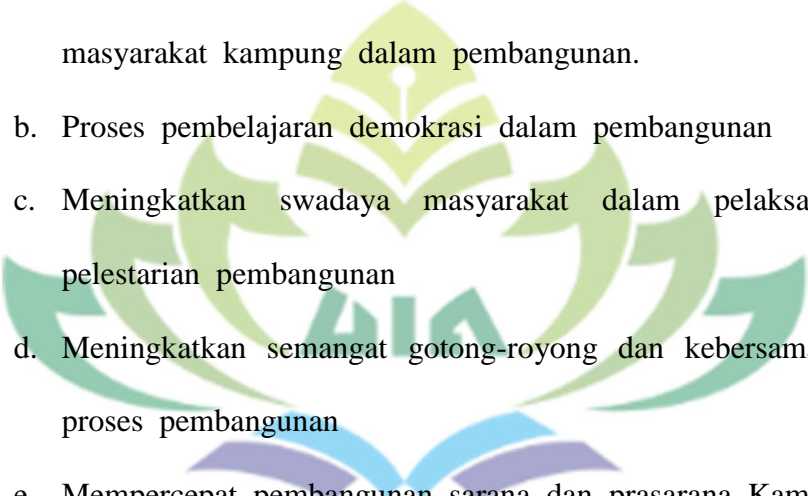
C. GSMK/K (Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan)

Program GSMK adalah model pembangunan berbasis masyarakat. Proses pembangunan di pedesaan dengan memanfaatkan kebersamaan persaudaraan dan kegotong-royogan menuju Kampung/Kelurahan mandiri.

Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 17 Tahun 2013, 21 Maret 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK) pra-sarana kampung dan ekonomi kampung Kabupaten Tulang Bawang. GSMK bermaksud

mengupayakan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk mendorong adanya program pembangunan oleh, dari dan untuk masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan pranata sosial khas yang ada di Tulang Bawang, pemerintah kabupaten Tulang Bawang memberikan bantuan dana langsung sebagai stimulan kepada masyarakat kampung/kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat.

1. Tujuan program GSMK

- a. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi aparat dan masyarakat kampung dalam pembangunan.
 - b. Proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan
 - c. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan
 - d. Meningkatkan semangat gotong-royong dan kebersamaan dalam proses pembangunan
 - e. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana Kampung
 - f. Menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan yang dilakukan.
- 

2. Prinsip-prinsip Kebijakan Program GSMK

- a. Inisiatif, usulan/ide pembangunan dari masyarakat
- b. Partisipatif, ada keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
- c. Demokratis, diputuskan secara musyawarah oleh seluruh masyarakat
- d. Manfaat, mempunyai nilai guna bagi masyarakat
- e. Gotong-royong, mengedepankan kebersamaan dari seluruh masyarakat
- f. Berkelanjutan, dinikmati, dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat.

Sasaran Lokasi kegiatan; seluruh Kecamatan di setiap kampung wilayah Tulang Bawang, sasaran pembangunan fisik adalah sarana dan prasarana Kampung yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat kampung yaitu; jalan, jembatan, saluran irigasi, atau lainnya dengan persetujuan bupati.

Prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan;

1. Dilaksanakan dengan menggunakan sumberdaya, tatacara dan teknologi tepat guna spesifik lokasi
2. Kegiatan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggung - jawabkan secara moral, teknis maupun administratif
3. Kegiatan dilakukan secara swakelola dan berswadaya

4. Bentuk swadaya dapat berupa bahan/material, dana, tenaga kerja, dan lain-lain.

Sumber dana besaran program GSMK Rp.200.000.000,. (Dua Ratus Juta Rupiah) per Kampung. Pencairan dana dilakukan 3 tahap :

- a. Kegiatan fisik 0% dana dicairkan 40%
- b. Kegiatan fisik 50% dana dicairkan 30%
- c. Kegiatan fisik 100% dana dicairkan 30%

3. Organisasi Pelaksanaan Kabupaten

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan (BPMK) Kabupaten Tulang Bawang, sebagai peanggung jawab pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan tingkat Kampung/Kelurahan
2. Konsultan Manajemen Pendamping (KMP) LPM Unila sebagai pembantu pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Tingkat Kampung/Kelurahan.

4. Fasilitator Kecamatan (FK)

- a. Fasilitator kecamatan adalah petugas yang diusulkan oleh camat berdasarkan musyawarah dengan kepala kampung dan pembina atau diusulkan oleh Bupati sebagai Ketua Tim Pembina Program GSMK
- b. Berkedudukan dibawah PJOK Program GSMK yang diangkat oleh Camat dengan kriteria :

- 1) Berpendidikan minimal SLTA dan berpengalaman dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat atau Diploma 3 atau Strata 1
- 2) Bertempat tinggal diwilayah kecamatan
- 3) Bersedia mengikuti ketentuan yang telah disusun dan arahan dari KMP-LPM Unila
- 4) Membuat pernyataan kesanggupan untuk mendampingi pelaksanaan program GSMK di kecamatannya sampai dengan selesai.

5. Tugas Pokok Fasilitator Kecamatan (FK)

- a. Membantu dan memfasilitasi Tim Pembina Kabupaten dan PJOP Kecamatan dan KMP-LPM Unila dalam kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan GSMK.
- b. Melakukan sosialisasi dan membentuk Pokmas bersama Astek menyusun dan memantapkan proposal rencana teknis, dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan Pokmas
- c. Melakukan pemberdayaan aparat kampung dan Pokmas serta memantau peralatan dan bahan yang akan digunakan, dan mengawasi penggunaan dana BLM dan pelaksanaan kegiatan
- d. Membantu Pokmas bersama Astek dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan pelapor serta aspek-aspek lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program GSMK.

6. Tugas Pokok POKMAS (Kelompok Masyarakat) sebagai pelaksanaan program GSMK
 - a. Bersama FK dan Astek menyusun usulan biaya dan rancangan teknis pembangunan infrastruktur sarana prasarana fisik Kampung.
 - b. Mengajukan usulan biaya kegiatan kepada Camat
 - c. Mengordinir masyarakat kampung (tenaga kerja) dalam pelaksanaan kegiatan GSMK
 - d. Membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja kepada masyarakat yang ikut bekerja
 - e. Secara berkala melaporkan semua kegiatan fisik dan keuangan BLM pokmas kepada Camat.

7. Sanksi
 - a. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan GSMK
 - b. Diberikan apabila bantuan dana digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
 - c. Sanksi dapat berupa :
 - 1) Sanksi masyarakat
 - 2) Sanksi hukum
 - 3) Sanksi administratif
 - d. Penundaan pencairan dana pada Kampung/Kelurahan
 - e. Kesepakatan sanksi dituangkan dalam SP2B.

8. Penghargaan

Penghargaan akan diberikan kepada Pokmas atau kecamatan yang melakukan program GSMK dengan baik. Penentuan Pokmas atau Kecamatan berprestasi akan dirumuskan oleh KMP-LPM Unila dengan memperhatikan aspek berikut:

- a. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip program GSMK
- b. Hasil kegiatan mempunyai kualitas hasil yang baik
- c. Relatif tidak ada masalah dalam pelaksanaan
- d. Pelaksanaan tepat waktu baik fisik maupun pelapornya
- e. Dan lain-lainnya berkontribusi dengan pelaksanaan dan hasil kegiatan.

Program GSMK merupakan salah satu program pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan pembanguna desa dalam jangka waktu panjang. Dalam hal ini, untuk merealisasikan program tersebut, butuh kerjasama yang kuat antara pemerintah, stakeholder dan seluruh masyarakat.

Dengan berhasilnya suatu pembangunan desa, merupakan upaya dari mempermudah masyarakat dalam akses meningkatkan perekonomian, sehingga masyarakat semakin berdaya dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aditya Bagus Kurniawan, “Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur”. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol.3 No 5, 2015.
- Fathurrahman fadil, “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan”. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Vol. 1 Edisi Juli-Desember, 2013.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metologi Penelitian Social Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Kartono Kartini, *pengantar Metodologi riset sosial*, Madar Maju: Bandung, cet.ke VII, 1996.
- Mawardi dan Nur Hidayat, *Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar*, Bandung; Pustaka Setia, 2000
- Jim Ife, Frank Tesoriero, *Comunnity Development* Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Rizal Andreyan, “Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda”. *e-Jurnal Administrasi Negara Vol. 2 Edisi 4 Tahun*, 2014.
- Rochajat Harun dan Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*, Jakarta; Rajawali Pers, 2011.
- Soetrisno. L, *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius, Yogyakarta; 1995.
- Sutrisno Hadi, *Metode Researh*, jilid 1, Yogyakarta: Fak Psi UGM,1986.
- Sugiono, *Metode Kuantitatif, Kualitatifdan, R&B*, Bandung: Alfa Beta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2015.
- Soetomo, *Pembangunan Masyarakat*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Tanziduhu ndraha, *Pembangunan Masyarakat 'Mempersiapkan Masyarakat Landas'*, Rineka Cipta Cet.2, 1990.

Totok Mardikanto, *Pemberdayaan masyarakat; Dalam Perspektif kebijakan publik*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Skripsi:

S. Sukmandi, “Dampak Pembangunan Bandara Internasional Kuala Namu Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang”. Tinjauan Pustaka Skripsi Program Sarjana Ilmu Pembangunan Universitas Sumatera Utara, Medan.

Web Site:

DAS Lestari, “Pengertian Para Ahli Mengenai Partisipasi Masyarakat”, (On-line), tersedia di: <http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-partisipasi-masyarakat.html> (9 Desember 2017).

Harisfadly, “Pembangunan Ekonomi dalam Alquran & hadits”, (On-line) Tersedia di: <http://harisfadly.wordpress.com/2009/03/25/23/> (09 Mei 2017).

Peraturan Undang-Undang:

Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program GSMK/K.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Pasal 2 ayat (4) huruf D.